

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesembilan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Arie S. Hutagalung, *Konominium dan Permasalahannya edisi revisi*, cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, cetakan pertama, Djambatan, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, cetakan kedua, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Deddy Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, cetakan kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Erwin Kallo, *Kamus Properti Indonesia*, cetakan pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016.
- , *Panduan Hukum Untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Konominium, Apartemen Dan Rusunami)*, cetakan pertama, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia*, cetakan kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law*, cetakan pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2018.
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, cetakan pertama, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018.

- Herlien Budiono, *Demikian Akta ini, Tanya Jawab mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, cetakan ketiga, Universitas Trisakti, Jakarta, 2017.
- J.Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, cetakan pertama, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan buku pertama*, cetakan keenambelas, Kanisius, Jakarta, 2018.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, cetakan keempat, Jaka Permata Aksara, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, cetakan keempat, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cetakan ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan keduapuluh satu, PT Intermedia, Jakarta 1985.

Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum*, cetakan pertama, C-Klik Media, D.I.Yogyakarta, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN

Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1443.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan keempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011, Lembaran Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Lembaran Berita Negara Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Lembaran Berita Negara Tahun 2011 Nomor 108.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

MAJALAH, ARTIKEL

Yoenazh Khairul Azhar, dari materi Legal Briefing “Antisipasi Hukum terhadap Implementasi Permen dan Pergub tentang Rumah Susun” oleh Erwin Kallo, property lawyers dari Erwin Kallo & Co, di Jakarta, 26 Maret 2019 dalam majalah Housing Estate Vol XV No.177 Mei 2019.

INTERNET

Anthony Djafar, “Yusril Siap Gugat Peraturan Menteri Terkait Rumah Susun”, diakses dari <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/381500-Yusril-Siap-Gugat-Peraturan-Menteri-Terkait-Rumah-Susun> pada tanggal 17 Januari 2019.

Dwi Putro Agus Asianto, “Yusril Dampingi REI dan P3SRI Gugat Peraturan Menteri PUPR Terkait Apartemen/Rusun”, diakses dari <https://www.suarakarya.id/detail/85230/Yusril-Dampingi-REI-Dan-P3SRI-Gugat-Peraturan-Menteri-PUPR-Terkait-ApartemenRusun> pada tanggal 17 Januari 2019.

M.Rochmad Purboyo, “APERSSI Himbau Masyarakat Jangan Beli Dulu Apartemen”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/47/888986/aperssi-himbau-masyarakat-jangan-beli-dulu-apartemen> pada tanggal 14 Februari 2019.

-----, “APERSSI Tolak Judicial Review Aturan Penghuni Rusun”, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190214/47/888922/aperssi-tolak-judicial-review-aturan-penghuni-rusun> pada tanggal 14 Februari 2019.

Rosiana Haryanti, “Permen Rusun Dinilai Tidak Adil bagi Pemilik”, diakses dari <https://properti.kompas.com/read/2018/11/17/050615021/permen-rusun-dinilai-tidak-adil-bagi-pemilik> pada tanggal 17 November 2018.

JURNAL HUKUM

Meirina Fajarwati, “Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan volume 48 Nomor 1/1596/Januari-Maret/2018*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Pieter E. Latumeten, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep ‘*Volmacht*’ Dan ‘*Lastgeving*’ Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 47 Nomor 1/133/Januari-Maret/2017*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

LAINNYA

Tanda Terima Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM yang diterima oleh Plt.Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ria Susilawesti tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta.

